

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA KOTA JAMBI  
TAHUN 2019**

**SKPD : Bappeda Kota Jambi**

**Tugas dan Fungsi : Merumuskan, Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan			Keterangan/ Penanggung jawab
					Alasan	Formulasi/Rumus/ Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kualitas perencanaan sebagai landasan pembangunan Kota Jambi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah dan perencanaan lainnya	%	85	Sesuai amanat permendagri No. 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Perbandingan Keselarasan Dokumen-dokumen Perencanaan yang Disusun dengan Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Perencanaan yang lebih tinggi	Dokumen Perencanaan Kota Jambi dalam satu tahun	Bappeda Kota Jambi
		Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan	%	70	Sesuai amanat permendagri No. 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Membandingkan Program/Kegiatan yang Dillaksanakan dengan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun yang Bersangkutan	Dokumen Perencanaan Kota Jambi dalam satu tahun	Bappeda Kota Jambi
2	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Jambi dalam	Persentase partisipasi dalam proses perencanaan	%	75	Sesuai amanat permendagri No. 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8	Membandingkan Tingkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan	Dokumen usulan masyarakat melalui Musrenbang	Bappeda Kota Jambi

	proses perencanaan				tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pengambilan kebijakan pembangunan daerah	dan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tingkat Keterwakilan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		
		Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat	%	35	Sesuai amanat permendagri No. 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Membandingkan Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Melalui Mekanisme Perencanaan sesuai Peraturan Perundangan dengan Program Kegiatan dan Anggaran yang Tersedia dalam APBD Tahun yang Bersangkutan.	Dokumen usulan masyarakat melalui Musrenbang	Bappeda Kota Jambi